

Penumpasan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Kabupaten Tegal 1949-1962

Nurul Fatimah,* Indriyanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*fatimah.nurul84@gmail.com

Abstract

This article examines the issues of the emergence of the Darul Islam Movement / Indonesian Islamic Army (DI / TII) in Tegal Regency and the crushing operations of the Tegal Regency DI / TII Movement carried out by the Indonesian National Army (TNI) in 1949-1962. The emergence of the DI / TII Movement in Tegal cannot be separated from the existence of a central policy towards Reorganization and Rationalization (RERA) within the Indonesian National Army. The RERA policy is intended to build the Indonesian National Army into a good and professional military organization on the basis of a clear and measurable competency education. Therefore, because of RERA, many affected military units must be issued or disbanded. One of the organizations of Hezbollah that was disappointed with RERA's decision was the Islamic Council. The Islamic Assembly Force led by Abas Abdullah finally decided to rebel against the government. In its development, Amir Fatah joined with Abas Abdullah to build the DI/TII Movement in Tegal. The separatist movement of DI/TII in Tegal make the government form various eradication operations such as Gerakan Banteng Negara or the State Bull Movement, Gerakan Banteng Raiders or the Bull Raiders Movement, and the joint operation between SWKS III and SWKS IV troops.

Keyword: *Amir Fatah; The Separatist; DI/TII; The Indonesian National Army.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji permasalahan tentang kemunculan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kabupaten Tegal dan operasi penumpasan Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 1949-1962. Kemunculan Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal tidak dapat dipisahkan dari adanya kebijakan dari pusat terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) di dalam TNI. Kebijakan RERA tersebut dimaksudkan untuk membangun TNI menjadi organisasi militer yang baik dan profesional dengan dasar pendidikan kompetensi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, dengan RERA banyak kesatuan militer yang terkena dampak harus dikeluarkan ataupun dibubarkan. Salah satu organisasi Hizbullah yang kecewa terhadap keputusan RERA adalah Majelis Islam. Pasukan Majelis Islam pimpinan Abas Abdullah pada akhirnya memutuskan untuk memberontak melawan pemerintah. Pada perkembangannya, Amir Fatah bergabung bersama Abas Abdullah membangun Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal. Gerakan separatis DI/TII Kabupaten Tegal menyebabkan pemerintah membentuk berbagai operasi penumpasan seperti Gerakan Banteng Negara, Gerakan Banteng Raiders dan operasi gabungan antara pasukan (*Sub Wehrkreise*) SWKS III dan pasukan SWKS IV.

Kata Kunci: Amir Fatah; Pemberontakan; DI/TII; Tentara Nasional Indonesia.

Pendahuluan

Salah satu sebab terjadinya Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal adalah kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi yang pemerintah terapkan pada TNI. Pemerintah menetapkan kebijakan reorganisasi karena Agresi Militer Belanda I yang mengharuskan pemerintah menandatangani Perjanjian Renville. Dalam satu isi, Perjanjian Renville memuat tentang ketentuan TNI yang harus hijrah dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah TNI yang hijrah menuju Jawa Tengah mencapai 35.000 orang. Banyaknya jumlah prajurit yang hijrah membuat pemerintah harus mengakomodasi para prajurit, di sisi lain pemerintah juga harus membiayai perang melawan Belanda. Pengeluaran yang besar dan tidak diimbangi dengan pemasukan, membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) membengkak, sehingga untuk mengurangi beban APBN pemerintah memutuskan untuk mengadakan reorganisasi TNI. Pemerintah hanya mempertahankan prajurit yang mempunyai keterampilan dalam memegang senjata, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai keahlian khusus dalam membuat taktik militer, sedangkan prajurit yang tidak memenuhi kriteria pemerintah otomatis akan terkena reorganisasi (Dijk, 1993: 127).

Para pasukan yang terkena reorganisasi sebagian besar berasal dari pasukan Hizbullah. Sebagian prajurit yang terkena reorganisasi ada yang merasa kecewa dan merasa bahwa perjuangannya dalam melawan Belanda tidak dihargai pemerintah. Pada akhirnya, pasukan yang terkena reorganisasi memutuskan untuk pulang ke daerahnya dan justru memilih untuk berbalik melawan pemerintah. Salah satu pasukan kelaskaran yang memutuskan untuk mengangkat senjata melawan TNI adalah Majelis Islam. Penyebab Majelis Islam memberontak adalah rasa kecewa terhadap keputusan reorganisasi. Pada awal gerakan, Abas Abdullah memimpin Gerakan Majelis Islam, namun setelah Dewan Pembelaan Masyumi mengirimkan Amir Fatah ke Karesidenan Pekalongan pada 1948, terjadi perubahan kepemimpinan. Abas Abdullah tidak lagi menjadi pemimpin Majelis Islam, tetapi kedudukan tersebut berganti menjadi milik Amir Fatah.

Kajian mengenai kiprah DI/TII dalam upaya penyebarannya kepada masyarakat juga pernah dikaji oleh A. Rahman dengan judul "Benteng Alla: Islamisasi Tanah Leluhur oleh Darul Islam/Tentara Nasional Indonesia". Kajian ini membahas tentang sebuah upaya pengislaman sebuah daerah pedalaman di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan Benteng Alla. DI/TII mengakomodir upaya untuk mengurus ekonomi komunitas sebagai tindakan preventif agar komunitas pedalaman tersebut tidak menjangkau ke kota dan mengakomodir pendidikan sebagai salah satu konsentrasi dari pergerakannya. Komunitas Benteng Alla pada akhirnya menjadi target TNI ketika datang ke Tana Toraja, dan lokasi komunitas tersebut berakhir dikosongkan selama beberapa tahun.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulisan artikel ini memanfaatkan sumber-sumber arsip koleksi Komando Daerah Militer IV Diponegoro (Kodam IV Diponegoro), Museum Mandala Bhakti, dan menggunakan referensi yang relevan dengan tema terkait seperti pustaka yang relevan dengan tema artikel ini. Parwanto (2000), menyoroti dampak dari keberadaan DI/TII dan pergerakannya terhadap keamanan di Kabupaten Tegal dan reaksi Serikat Buruh dan Organisasi Massa setempat. Melalui pustaka ini, tentu dapat dilihat dan ditinjau kembali tentang kiprah DI/TII dan upaya-upaya penumpasan yang dilakukan oleh TNI untuk menanggulangi keadaan yang *chaos* akibat pemberontakan DI/TII.

Faktor Penyebab Terjadinya Gerakan DI/TII

Pada 1948, Amir Fatah masih setia dengan Republik Indonesia dan melaksanakan setiap tugas yang Dewan Pembelaan Masyumi berikan. Pada 1948, ketika Pemerintah melaksanakan reorganisasi, terjadi perubahan dalam kesatuan Brigade VIII. TNI mengubah Batalion 51 menjadi Batalion III dan Batalion 52 berubah menjadi Batalion Brigade VIII/Divisi III. TNI kemudian menggabungkan Batalion III dan Batalion VIII/Divisi III menjadi satu dengan nama SWKS III/Brigade/VIII/Divisi III. Setiap tugas yang dijalankan oleh pasukan SWKS III harus berada di bawah komando Mayor Wongsoatmodjo, sedangkan Mayor Wongsoatmodjo memberikan Amir Fatah tugas sebagai Koordinator SWKS III wilayah Tegal dan Brebes (Parwanto, 2000: 42).

Pada awalnya pelaksanaan reorganisasi TNI berjalan lancar. Pihak TNI dan pihak Hizbullah dapat bekerja sama dalam melawan Belanda, tetapi setelah Februari 1949, keadaan berubah drastis, Amir Fatah justru balik melawan TNI. Amir Fatah yang memilih bergabung bersama Majelis Islam (MI) dan mendirikan Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal. Gerakan DI di Kabupaten Tegal berawal dari organisasi MI yang berhasil dibentuk oleh Abas Abdullah dan Amir Fatah. Para anggota DI/TII Kabupaten Tegal menggunakan agama dalam upayanya menarik perhatian masyarakat. Penduduk Kabupaten Tegal yang religius dengan tingkat pendidikan rendah menyebabkan mereka menjadi penganut agama yang fanatik sehingga ketika mendapatkan ajakan untuk melakukan jihad membangun Negara Islam, mereka tidak melakukan penolakan. Sebagian penduduk yang meyakini konsep Negara Islam memutuskan untuk bergabung dengan DI/TII (Dinas Sejarah Militer TNI, 1974: 9).

Pada masa perjanjian Renville, Dewan Pembelaan Masyumi mengirimkan Amir Fatah untuk menjaga daerah Tegal dan Brebes dari serangan Belanda. Amir Fatah bersama Batalion 52 Hizbullah yang ia pimpin akhirnya melaksanakan tugas tersebut. Pada perkembangannya, Amir Fatah justru memutuskan untuk mengkhianati Pemerintah Republik dan memutuskan bergabung bersama Majelis Islam. Selama masa Perjanjian Renville, Amir Fatah membangun susunan pemerintahan militernya dari kepala desa sampai bupati. Tidak adanya pasukan TNI yang ikut serta dalam menjaga daerah Tegal-Brebes memudahkan Amir Fatah dalam membentuk pemerintahan militernya sendiri. Pemerintahan Militer Amir Fatah menghadapi kendala ketika TNI memutuskan mengirim Mayor Wongsoatmodjo selaku pemimpin Batalion III Brigade 8/III untuk menggantikan Amir Fatah sebagai Kepala Keamanan Karesidenan Pekalongan. Peristiwa tersebut terjadi pada 1949. Amir Fatah yang tidak menerima posisinya digantikan oleh Mayor Wongsoatmodjo memutuskan untuk mendirikan gerakannya sendiri yang diberi nama Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal (Dijk, 1993: 130).

Pembentukan Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal ditandai dengan pengangkatan Amir Fatah sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah oleh Kamran Cakrabuwana, seorang Panglima Divisi DI/TII Jawa Barat. Kabar Amir Fatah yang memutuskan bergabung bersama MI tersebar sampai di kesatuannya. Pasukan SWKS III/F dan SWKS III/C yang berasal dari pasukan Hizbullah memutuskan untuk ikut bergabung bersama MI dan menyatakan tidak mau lagi menuruti perintah TNI. Hal ini mereka buktikan dengan pengunduran diri mereka ke Desa Pengarasan dan membentuk Batalion sendiri (Parwanto, 2000: 44). Amir Fatah mengundurkan diri ke Desa Pengarasan Agustus 1949. Hal pertama yang Amir Fatah lakukan setelah sampai di Desa Pengarasan adalah melakukan konsolidasi bersama pasukannya yang terdiri atas pasukan Hizbullah dan rakyat yang bersimpati dengan Gerakan DI/TII.

Dalam usaha untuk menunjukkan eksistensinya, Amir Fatah berusaha untuk merebut pos komando *Sub Wehrkreise* di Bentarsari. Mereka melanjutkan aksinya dengan menyerang satuan Brimob dan menculik R.M. Bambang Suprpto dan Abdul Djalil. Pasukan DI/TII memutuskan untuk menembak keduanya setelah melakukan penahanan selama beberapa hari (Dijk, 1993: 132). Pasukan DI/TII terus melakukan penyerangan, seolah mereka tidak puas terhadap penyerangan dan pembunuhan kepada anggota TNI dan Mobile Brimob, anggota DI/TII terus bergerak dengan menyerang pos-pos pertahanan TNI membuat pasukan TNI terpaksa harus mengungsi sementara waktu ke daerah Majenang. Serangan-serangan mendadak yang DI/TII laksanakan membuat TNI rugi secara material maupun non material, namun TNI tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian yang mereka dapatkan. Dalam aksi penyerangan tersebut, pihak DI/TII berhasil menahan KDM Brebes dengan stafnya, Operasi Distrik Militer (ODM) Bantarkawung beserta asisten dan wedana (Arsip Koleksi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro No. 14, Museum Mandala Bhakti).

Usaha DI/TII untuk Menarik Massa

Dalam setiap gerakan, seorang pemimpin membutuhkan para pengikut. Hal ini mereka lakukan untuk menyukseskan pendirian gerakan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi DI/TII dalam menarik massa yaitu dengan menerapkan Islam sebagai Ideologi dan kepemimpinan yang kharismatik. Cara DI/TII dalam menarik massa adalah dengan memanfaatkan kefanatikan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap agama. Pada masa-masa prakemerdekaan, pendidikan formal merupakan barang langka yang tidak dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Pendidikan formal hanya dapat diakses oleh golongan bangsawan atau para pegawai pemerintah saja sedangkan kalangan biasa dan miskin hanya mampu memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong mengapa masyarakat Kabupaten Tegal tumbuh menjadi masyarakat yang fanatik terhadap agamanya. Sistem pendidikan pesantren yang memiliki keunikan tersendiri, menciptakan ruang yang bebas untuk para siswanya dalam berdiskusi tentang materi-materi seperti fiqih. Proses pembelajaran dan tukar ilmu pengetahuan juga dilakukan dengan terbuka antara siswa dan para kiai yang mengajar mereka (Dwijayanti, 2014: 37).

Pada masa sebelum kemerdekaan, para kiai juga menyampaikan materi tentang Perang Sabil atau perang yang memiliki tujuan untuk membela Islam dan memerangi musuh-musuh Islam. Para Kiai menanamkan paham tentang Perang Sabil sejak para murid masih kanak-kanak, sehingga ketika para santri sudah dewasa, para kiai mengharapkan santri-santri sudah mengerti pemahaman Perang Sabil dengan baik. Keberadaan sosok Kiai tidak hanya menjadi junjungan bagi para santri namun juga para orang tua, karena dianggap sudah berjasa dalam memberikan ilmu kepada masyarakat. Penghargaan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk rasa menghormati saja, tetapi juga dalam bentuk sikap patuh (Muhammad, 2000: 22).

Rasa patuh dan sikap menghargai terhadap pemuka agama itu yang dimanfaatkan oleh pihak DI/TII. Amir Fatah sebagai pemimpin gerakan DI/TII Kabupaten Tegal bersama dengan kawan-kawannya berperan sebagai kiai yang menyebarkan ilmu-ilmu agama dan paham-paham tentang pendirian Negara Islam kepada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai sifat patuh dan tunduk, tidak memprotes ajaran yang diberikan oleh anggota DI/TII. Masyarakat Kabupaten Tegal percaya bahwa jika Indonesia menganut Ideologi Islam maka Allah akan meridhoi segala urusan ketatanegaraan.

Para pemimpin DI/TII tidak hanya menyebarkan konsep tentang jihad dalam pendirian Negara Islam, tetapi mereka juga menyebarkan tentang kemungkinan munculnya

rasul lain setelah Nabi Muhammad SAW. Para anggota DI/TII menganggap bahwa Amir Fatah sebagai utusan Allah, rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Para anggota DI/TII bahkan mengganti kalimat syahadat dari *laillahailaah Muhammad Rassulullah* menjadi *lailahailaah Amir Fatah Rasulullah* (Arsip koleksi komando Daerah Militer IV/Diponegoro No.85, Museum Mandhala Bakti). Dalam proses penyebaran ajaran agama, Desa Pengarasan menjadi fokus utama DI/TII, sehingga tidak mengherankan jika pengaruh ajaran DI/TII sangat kuat tertanam di desa ini.

Permulaan konflik antara TNI dengan DI/TII

Konflik di antara TNI dan DI/TII mulai terjadi pada Maret 1949. Konflik tersebut terjadi antara Pasukan Dimiyati dan TNI yang terdiri dari Kompi Supadi, Kompi Sutardjo dan Kompi Hadisutrisno. Konflik mulai terjadi ketika seorang warga melaporkan penindasan yang Pasukan Dimiyati lakukan di Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bentuk penindasan yang pasukan Dimiyati lakukan berupa penyiksaan terhadap lima orang penduduk Pagerbarang dan seorang warga di antaranya sampai meninggal dunia. Penyebab penyiksaan kepada lima warga tersebut karena korban menolak untuk memberikan bantuan makanan kepada pasukan Dimiyati (Arsip Koleksi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro no.85, Museum Mandala Bhakti).

Kasus kekerasan yang semakin meningkat menimbulkan keresahan kepada penduduk sehingga mendorong penduduk melaporkan tindak kejahatan pasukan Dimiyati. Pihak TNI menanggapi laporan warga dengan memanggil dua konsulat MI untuk meminta konfirmasi kebenaran laporan tersebut. Dua anggota DI/TII yang berhasil ditangkap mengakui telah membunuh seorang warga, namun mereka tidak menjelaskan tentang alasan mereka membunuh. Dalam proses penyelidikan, kedua orang tersebut sempat melarikan diri, sayangnya satu orang tertangkap kembali dan satu orang berhasil melarikan diri lagi. Berita tentang tertangkapnya konsulat MI membuat para petinggi MI marah. Mereka berencana untuk membalas dendam atas perlakuan TNI kepada anggotanya. Mereka mengirim surat "Tuntutan Darah" bertinta merah. Dalam surat tersebut berisi ancaman-ancaman kepada TNI. Mereka juga melakukan penembakan terhadap Kompi Hadisutrisno yang sedang berpatroli di Desa Slarang.

Peristiwa baku tembak di Desa Slarang menjadi awal pertempuran antara TNI dan DI/TII, hari-hari selanjutnya pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Amir Fatah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Desa Pengarasan. Dalam usaha untuk menunjukkan eksistensinya, Amir Fatah berusaha untuk merebut pos komando Sub Wehrkeise di Bentarsari. Mereka melanjutkan aksinya dengan menyerang satuan brimob dan menculik R.M. Bambang Suprpto dan Abduldjalil. Pasukan DI/TII memutuskan untuk menembak keduanya setelah melakukan penahanan selama beberapa hari (Dijk, 1993: 132). Pasukan DI/TII terus melakukan penyerangan, seolah mereka tidak puas terhadap penyerangan dan pembunuhan kepada anggota TNI dan Mobile Brimob, anggota DI/TII terus bergerak dengan menyerang pos-pos pertahanan TNI membuat pasukan TNI terpaksa harus mengungsi sementara waktu ke daerah Majenang. Serangan-serangan mendadak yang DI/TII laksanakan membuat TNI rugi secara material maupun non-material, akan tetapi TNI tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian yang mereka dapatkan. Dalam aksi penyerangan tersebut, pihak DI/TII berhasil menahan Komandan Distrik Militer (KDM) Brebes dengan stafnya, ODM Bantarkawung beserta asisten dan wedana (Arsip Koleksi Komando Daerah militer IV/Diponegoro No. 85, Museum Mandhala Bakti).

Persiapan Pembentukan Operasi Penumpasan

Latar belakang pembentukan Gerakan Banteng Negara berawal dari perkembangan baru dari pasukan DI/TII yang berhasil menyusun kembali pasukannya. Dalam mengatasi hal tersebut, Panglima Divisi III/GM III mengeluarkan instruksi untuk membentuk Komando Operasi Gerakan Banteng (Dijk, 1993: 132). Maksud pembentukan Gerakan Banteng Negara adalah meningkatkan efektifitas TNI dalam melakukan operasi penumpasan di Jawa Tengah, terutama di daerah Tegal dan Brebes. Pasukan Gerakan Banteng Negara terdiri atas pasukan Brigade Infanteri Divisi III/G.M III, Divisi IV, Batalion Administrasi dan Batalion Satuan Tempur.

Dalam menyelesaikan persoalan DI/TII, pemerintah menggunakan beberapa cara, antara lain, Jalur Damai dan Operasi penumpasan. Pada 1950, pemerintah mempunyai solusi lain dalam menyelesaikan persoalan DI/TII, yakni dengan cara menempuh jalur damai. Persoalan defisit APBN menjadi alasan pemerintah mulai menempuh jalur ini. Salah satu langkah yang pemerintah lakukan yakni ajakan penyerahan diri. Pemerintah melakukan cara tersebut melalui penyebaran selebaran-selebaran kepada masyarakat. Pada selebaran tersebut tertulis keuntungan yang akan para gerilyawan DI/TII dapatkan ketika mereka menyerahkan diri.

Operasi penumpasan yang direncanakan oleh TNI antara lain Perang Gerilya dan Taktik Ayam Alas dan Taktik Nyundung. Metode Perang Gerilya yang TNI lakukan adalah dengan membangun pos di setiap desa, kemudian satu kompi pasukan infanteri akan menjaga setiap pos tersebut. Setiap pagi dan malam, anggota TNI yang menjaga pos melakukan patroli secara rutin mengelilingi desa. Tujuan patroli tersebut adalah meminimalisir terjadinya penyerangan oleh DI/TII. Sementara itu, Taktik *Ayam Alas* dan Taktik *nyundung* adalah sebuah taktik yang pasukan Banteng Raiders gunakan. Taktik *nyundung* adalah penyerangan lawan dengan cara menunggu musuh di tempat yang sering musuh gunakan untuk konsolidasi, berkumpul atau bersembunyi. Para anggota TNI dalam melakukan serangan terlebih dahulu harus menyamarkan diri, sehingga musuh tidak mengetahui keberadaan mereka. Para pasukan TNI terbagi menjadi beberapa kelompok dan mereka melakukan serangan ketika sudah mendapatkan komando dari komandan mereka.

Proses Penumpasan Gerakan DI/TII

Penumpasan Gerakan DI/TII dilakukan melalui sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Banteng Negara. Gerakan ini merupakan operasi yang dilakukan oleh TNI dalam menghentikan Gerakan DI/TII. Latar belakang pembentukan Gerakan Banteng Negara berawal dari perkembangan baru dari pasukan DI/TII yang berhasil menyusun kembali pasukannya. Dalam mengatasi hal tersebut, Panglima Divisi III/GM III mengeluarkan instruksi untuk membentuk Komando Operasi Gerakan Banteng (TNI, 1974: 197-203). Maksud pembentukan Gerakan Banteng Negara adalah meningkatkan efektifitas TNI dalam melakukan operasi penumpasan di Jawa Tengah, terutama di daerah Tegal dan Brebes. Pasukan Gerakan Banteng Negara terdiri atas pasukan Brigade Infanteri Divisi III/G.M III, Divisi IV, Batalion Administrasi dan Batalion Satuan Tempur. Tujuan pembentukan GBN tidak terbatas pada menghentikan Gerakan DI/TII tetapi juga menghambat Gerakan DI/TII agar tidak meluas ke daerah lain. Pemerintah membentuk Gerakan Banteng Negara pada 7 Januari 1950. Panglima Divisi III/GM Kolonel Gatot Subroto menunjuk Komandan Brigade II/III, Letkol M. Sarbini sebagai pemimpin Gerakan Banteng Negara. Dalam upaya menyukseskan Gerakan Banteng Negara, Letkol M. Sarbini menyusun beberapa siasat, di antaranya; *pertama*, mengganti aparat pemerintahan yang pro dengan DI/TII menjadi aparat yang pro dengan pemerintah dan TNI; *kedua*, Melakukan sosialisasi secara rutin kepada

rakyat dan kepada aparat desa tentang dampak negatif bergabung bersama Gerakan DI/TII; *ketiga*, melakukan patroli secara rutin di setiap desa yang berada di Kabupaten Tegal.

Selain itu, TNI juga membentuk operasi Banteng Raiders pada 1952. Alasan pembentukan Operasi Benteng Raiders adalah memaksimalkan operasi penumpasan yang TNI lakukan. Sebelum pembentukan Operasi Banteng Raiders, TNI mengaku sempat kewalahan membendung ekspansi pasukan DI/TII ke luar daerah Tegal, sedangkan di sisi lain, TNI juga sedang berusaha mempertahankan daerah-daerah yang sudah mereka rebut dari tangan anggota DI/TII. Alasan tersebut, yang membuat TNI memutuskan untuk membentuk Operasi Benteng Raiders. Personel yang menjadi anggota Operasi Benteng Raiders pun sudah mendapatkan pelatihan selama dua bulan sehingga ketika melaksanakan serangan, TNI dapat melumpuhkan anggota DI/TII secara cepat (Dinas Sejarah Militer TNI, 1974: 197-203).

Akhir Penumpasan Gerakan DI/TII

Penyuluhan pemerintah berikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan materi berupa dampak negatif mengikuti Gerakan DI/TII dan pemerintah juga memberikan ilmu tentang pendidikan Pancasila kepada masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Tegal dapat lebih mencintai negara dan tidak mempunyai pikiran untuk mencoba memberontak, melepaskan diri dari Negara Indonesia. Metode penyuluhan yang pemerintah berikan yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa setempat. Pemerintah juga menggandeng para birokrasi setempat, dan para staf Banteng Negara dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak mengikuti Gerakan DI/TII.

Pada 1954, para pemimpin DI/TII mulai tertangkap satu per satu. Para pemimpin DI/TII yang sudah bertobat kemudian menyerukan kepada para stafnya untuk segera ikut menyerahkan diri. Salah satu pemimpin yang menyerahkan diri pada 1954 adalah Zaenal Abidin. Zaenal Abidin kemudian turut serta membantu TNI dalam menumpas Gerakan DI/TII. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk informasi tempat persembunyian DI/TII. Dia juga tidak lupa untuk mengajak teman-temannya untuk menyerahkan diri. Menurut Zaenal, akan lebih baik jika teman-temannya menyerahkan diri, daripada tertangkap dan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Informasi pemberian Zaenal Abidin kemudian langsung TNI tindak lanjut dengan membakar pos-pos DI/TII, TNI juga merusak sawah-sawah milik keluarga DI/TII sehingga kelompok DI/TII kehilangan pasokan makanannya (Syariffudin, 1962: 23).

Pada 1961 pasukan DI/TII hanya tersisa lima Batalion saja. Kesulitan dalam mendapatkan logistik, anggota yang meninggal dan anggota yang menyerahkan diri membuat anggota DI/TII berkurang drastis. Para anggota DI/TII semakin terdesak ketika Kartosuwiryo tertangkap. Pada akhirnya anggota DI/TII yang tersisa tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan diri, mereka berharap dengan menyerahkan diri akan mendapatkan pengurangan hukuman. Pada 1962, TNI menyatakan bahwa Gerakan DI/TII di Jawa Tengah sudah tidak ada lagi.

Simpulan

Salah satu penyebab terjadinya Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal adalah kebijakan reorganisasi. Kebijakan tersebut menyebabkan Abas Abdullah selaku pemimpin Majelis Islam menjadi kecewa. Dia merasa pemerintah tidak menghargai perjuangannya dalam melawan Belanda, sehingga dia memutuskan untuk mendirikan gerakan separatis untuk melawan pemerintah. Dalam perkembangannya, Amir Fatah memutuskan untuk masuk ke dalam organisasi Majelis Islam. Visi misi yang sama untuk membangun Negara Islam

membuat Amir Fatah memutuskan untuk bergabung dan mendirikan Gerakan DI/TII Brebes.

TNI dalam usahanya mengatasi Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal membentuk beberapa operasi penumpasan, di antaranya Operasi Gerakan Banteng Negara, Operasi Banteng Raiders, dan Operasi Guntur. Operasi Gerakan Banteng Negara, dibentuk pemerintah pada 7 Januari 1950. Pemerintah menunjuk Letkol Sarbini sebagai pemimpin Operasi GBN. Wilayah operasi GBN meliputi Kerasidenan Pekalongan dan Kerasidenan Banyumas. Pada permulaan pembentukan GBN, Letkol Sarbini berusaha untuk memisahkan koordinasi antara DI/TII Kabupaten Tegal dengan Gerakan DI/TII di Jawa Barat. Putusnya koordinasi antara DI/TII Kabupaten Tegal dengan DI/TII Jawa Barat akan memberikan dampak terputusnya pemberian bantuan, baik dalam bentuk makanan maupun pengiriman pasukan. Selama periode 1950-1962, TNI melakukan berbagai operasi penumpasan dengan target pasukan DI/TII. TNI menyatakan Gerakan DI/TII selesai pada 1962 ketika pasukan terakhir menyerahkan diri di Losari, Brebes.

Referensi

- Dijk, C. Van (1993). *Darul Islam sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Dinas Sejarah Militer TNI (1974). *Gerakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya*. Bandung: Disjarah TNI AD.
- Dwijayanto, Reno A (2014). "Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo Tahun 1948-1962." Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad, Iskandar (2000). *Peranan Elite Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Parwanto, Dudun "Reaksi Serikat Buruh dan Organisasi Massa Terhadap Teror dan Gangguan Keamanan DI/TII di Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962." Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2000.
- "Surat dari Kepala Staff SWKS III kepada Komandan Brigade (Komandan Daerah I), no. 58/SWKS III/1949" (Arsip Koleksi Komando Daerah Diponegoro No. 85, Museum Mandala Bhakti).
- "Surat Amanat Wakil Panglima Angkatan Bersenjata RI pada Upacara Peresmian Monumen GBN di Tegal pada Tanggal 6 Oktober 1976" (Arsip Koleksi Komando Daerah Militer IV/Diponegoro No. 14, Museum Mandala Bhakti).
- Syariffudin, Amak (1962). *Kisah Kartosuwiryo dan Menyerahnya*. Surabaya: Grip.